

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama tahun anggaran berjalan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian beberapa indikator kinerja utama yang menunjukkan hasil yang optimal, di antaranya indikator layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan secara komprehensif. Seluruh kasus yang dilaporkan telah mendapatkan layanan pendampingan sehingga persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, keterbatasan kapasitas lembaga layanan di beberapa daerah, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Kondisi ini memerlukan perhatian dan upaya yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

Ke depan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan akan terus berupaya meningkatkan kinerja melalui penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas

sektor, serta peningkatan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak.

Melalui upaya tersebut diharapkan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan dapat semakin optimal sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kinerja sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.